

SKRIPSI

**KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM
DUNIA PENDIDIKAN ISLAM**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

Tri Wahyu Arissanti

NIM: 17.0401.0022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan pada suatu wilayah. Di mana pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi dan aspek sosial, bahkan ada yang berpendapat jika pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia.¹ Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik guna mengembangkan dirinya supaya peserta didik dapat menjalani hidupnya secara mandiri.² Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Karena pentingnya pendidikan, Islam menempatkan pendidikan pada kedudukannya yang tertinggi.³

Sistem pendidikan sering dipahami sebagai pola menyeluruh dari proses pendidikan dalam lembaga-lembaga formal, agen-agen serta organisasi dengan mentransfer pengetahuan, warisan kebudayaan serta sejarah kemanusiaan yang memengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual. Artinya, sistem pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sistem-sistem diluarnya, seperti sistem politik, sistem tata laksana, sistem keuangan dan sistem kehakiman. Mengingat

¹ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan : Asas dan Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 23.

² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), hal.23.

³ Halid Hanafi, La Adu dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 18.

pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka islam sebagai agama yang rahmatil lil alain memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu.⁴

Salah satu pemimpin terbesar pada masa Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, diangkat menjadi gubernur Madinah setelah pemimpin Dinasti Umayyah terdahulu wafat karena sakit, Sulaiman bin Abdul Malik yang sudah berwasiat agar Umar menggantikannya menjadi seorang khalifah. Namun, Umar tidak serta merta langsung menerima wasiat tersebut, beliau sempat menolak, namun karena desakan dari kaum muslimin Umar akhirnya menerimanya. Umar diangkat menjadi khalifah pada tahun 716 M, lebih tepatnya setelah ashar.⁵ Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang sangat hebat pada masanya walaupun pemerintahannya tak lama, hanya sekitar dua tahun lima bulan. Pemerintahan Umar benar-benar menggariskan kesan yang sangat bagus bagi umatnya, seperti kebijakan-kebijakan beliau dibidang ekonomi, politik dan juga bidang pendidikan benar-benar membawa perubahan besar bagi masyarakat kala itu.⁶

Beberapa hal yang sangat berpengaruh pada pendidikan kala itu adalah bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas semua kebijakan pendidikan

⁴ Hasan Baharun, “*Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*” dalam Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, (2018). hal. 35.

⁵ Moh Hasyim Rosyidi, Kepemimpinan Profetik Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Ummul Qura Vol. X, No. 2*, (2017), hal. 25.

⁶ Muh. Alif Kurniawan et.al, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 73.

yang telah dibuat. Fakta dalam sejarah juga menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin pada masa itu adalah seorang ahli ilmu yang dapat mengajarkan ajarannya dengan sangat baik. Hal itu juga terbukti dari majunya negara pada semua bidang termasuk dalam bidang pendidikan⁷. Artinya, pemerintah merupakan pembuat sekaligus pelaksana terdepan dalam pengembangan dunia pendidikan. Di antara tokoh pemimpin masa silam yang mashut dengan keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah seorang pemimpin terseohor dari kalangan Bani Umayyah (Daulah Umawiyah). Dia dikenal sebagai salah satu pembaharu utama dalam pemikiran dan peradaban islam yang telah memberikan teladan positif dan konstruksi bagi pendidikan islam.⁸

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan perkembangan dunia pendidikan sebagaimana yang tertulis di atas. Salah satu hal yang dilakukan Umar kala itu adalah mendirikan madrasah. Madrasah yang didirikan Umar bin Abdul Aziz tidak hanya di kota-kota besar, namun didirikan diseluruh teritorial Dinasti Umayyah. Sekolah-sekolah yang dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz lebih fokus pada penanaman nilai-nilai keagamaan dan menggunakan kurikulum yang sudah berkembang dan dikenal kala itu.⁹ Para pengajar di madrasah itu berasal dari kalangan ulama

⁷ Yusuf Hanifah, "Rekonstruksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan." *Al-Fahmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2021), hal. 88.

⁸ Moh Hasyim Rosyid, "Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz," *dalam Jurnal Ummul Qura Vol. X, No. 2, (2017)*, hal. 19.

⁹ Atik Febri Christianing Tyas1), Ending Baharuddin2), "Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadits Dengan Metode Rihlah." *In Annual Conference On Madrasah Studies* (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2018), hal. 109-110.

dan ilmuwan ternama pada masa itu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar pada umumnya berisikan apa yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan.

Dari paparan diatas, menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang sangat memperhatikan pendidikan, beliau menganggap bahwa pendidikan adalah adalah sebuah hal yang sangat penting. Beberapa kebijakan penting dilakukan Umar bin Abdul Aziz pada sektor pendidikan, salah satunya adalah pada sektor pendidikan formal. Sektor ini menjadi fokus utama dengan keseriusannya mengembangkan keilmuan agama secara umum. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masanya.

B. Batasan Masalah

Agar terhindar dari meluasnya pembahasan pada penelitian Kebijakan Umar bin Abdul Aziz Dalam Dunia Pendidikan Islam, maka penulis hanya akan fokus pada kebijakan Umar dibidang pengembangan pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Kebijakan umar bin Abdul Aziz Dalam Dunia Pendidikan Islam?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang memerlukan. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam dunia pendidikan, keilmuan dan dapat memperluas khasanah ilmu dalam karya ilmiah, serta menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Mendapatkan fakta dan data akurat mengenai kebijakan Umar bin Abdul Aziz khususnya dalam dunia pendidikan, dan menjadi pengetahuan dalam dunia pendidikan, serta membuka wawasan dan pengetahuan dalam bidang agama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau *policy* diterjemahkan dengan politik, aturan, Undang-Undang, kesepakatan, dan rencana strategis. Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian rencana atau serangkaian konsep yang menjadi dasar dari sebuah pelaksanaan pekerjaan pemerintah untuk mencapai sasaran. Kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁰

Pengertian kebijakan disini menekankan kepada hasil keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui musyawarah dengan lembaga-lembaga pemerintahan untuk kemajuan masyarakat. Sebab nantinya kebijakan yang telah diputuskan akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengandung makna dan prinsip bagi orang banyak, namun juga tidak merugikan banyak orang. Karenanya kebijakan harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹¹

¹⁰ Arwildayanto, Arifin Sulking, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: Cendekia Press, 2018), hal. 3-4.

¹¹ Yoyon Bahtiar dan Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal. 34.

Pengertian lain dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab dalam Yoyon Bahtiar, yang menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah.¹² Adanya suatu masalah akan membuat sejumlah politisi melakukan tindakan nyata untuk memecahkan masalah yang ada dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Tindakan politik dalam membuat kebijakan dilakukan secara sengaja oleh para pelaku politik. Kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu bidang kegiatan.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan matang serta berhati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan yang sesuai.

b. Tahap-tahap Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Perumusan masalah atau penyusunan agenda dapat membantu dalam menemukan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan

¹² *Ibid.*, hal. 35

¹³ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)., hal. 79.

menentukan tujuan dan memadukan pandangan yang bertentangan untuk merancang peluang kebijakan yang baru.

- 2) Peramalan atau formulasi kebijakan. Dibuatnya formulasi kebijakan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan mengetahui akibat dari keputusan yang telah diambil. Dapat memperkirakan apakah kebijakan yang diambil mengalami kendala serta memperkirakan kelayakan dari setiap keputusan yang diambil dan dilaksanakan.
- 3) Rekomendasi kebijakan atau adopsi kebijakan. Usulan-usulan dari kebijakan lalu diambil dan diterapkan. Rekomendasi kebijakan ini dapat membantu memperkirakan tingkat risiko dan ketidakpastian dalam menentukan pertanggungjawaban dari implementasi kebijakan.
- 4) Pemantauan. Kebijakan yang telah dipilih dan diterapkan pada masyarakat dilakukan pemantauan, apakah kebijakan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi khalayak ramai.
- 5) Evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui seberapa berhasil kebijakan yang telah diterapkan serta untuk mengidentifikasi kekurangan pada kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi kebijakan ini juga menghasilkan kesimpulan dari terselesaikannya suatu masalah, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali.¹⁴

¹⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 172-173.

c. Teori Implementasi Kebijakan

Edward III dalam Subarsono, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan pada kelompok sasaran atau target.
- 2) Sumber daya, sumber daya dalam kebijakan dapat berwujud manusia, misalnya sumber daya finansial. Karena jika kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.
- 3) Disposisi, adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika implementator memiliki sifat yang baik maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.
- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan.¹⁵

d. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Semua bidang kehidupan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk dijadikan pedoman dalam bertindak dan pembatasan perilaku, sehingga mempunyai arah yang jelas dalam melangkah ke

¹⁵ A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 90-92.

masa depan. Kebijakan tersebut tak terkecuali juga ada dalam bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pengertian lain dijelaskan oleh Arif Rohman yang mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang secara khusus mengatur kegiatan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan penyerapan, alokasi dan distribusi sumber penyelenggaraan pendidikan serta pengaturan perilaku dalam

¹⁶ Riant Nugroho, *Analisis Kebijakan* (Semarang: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 140.

pendidikan.¹⁷ Dari pengertian tersebut jelas bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang khusus memecahkan masalah dan mengatur kegiatan dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini kebijakan pendidikan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkaitan dengan standar publik.

Dari beberapa pengertian kebijakan pendidikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan yang khusus mengatur kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

e. Komponen-komponen Kebijakan

Charles O. Jones mengemukakan sebuah kebijakan mencakup lima komponen, yaitu:

- 1) Tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan

¹⁷ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 86.

dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak.

- 2) Rencana. Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksanaan kebijakannya jelas dan terarah.
- 3) Program. Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya, dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.
- 4) Keputusan. Keputusan adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil uji coba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat

diterimanya kebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi bahan pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan yang akan ditetapkan.

- 5) Dampak. Dampak merupakan efek dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiri pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif.¹⁸

Dari kelima komponen di atas dapat disimpulkan bahwa komponen saling berhubungan dan berkaitan karena tanpa kelima komponen tersebut kebijakan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

f. Karakteristik Kebijakan

Kebijakan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

- 1) Memiliki tujuan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memiliki aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya harus diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan itu diakui dan secara sah berlaku untuk suatu wilayah. Maka, kebijakan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku

¹⁸ *Ibid.*, hal. 79-80.

sehingga dapat dinyatakan sah dan resmi untuk berlaku di wilayah tersebut.

- 3) Memiliki konsep operasional. Kebijakan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah sebuah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- 4) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan harus dibuat oleh para ahli dibidangnya yang memiliki kewenangan, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- 5) Dapat dievaluasi. Kebijakan tentunya tak luput dari tindakan yang harus ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, harus diperbaiki. Sehingga, kebijakan memiliki karakter yang dapat memungkinkan adanya evaluasi yang mudah dan efektif.
- 6) Memiliki sistematika. Kebijakan juga merupakan sebuah sistem, dan memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematika juga harus memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan

tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lain. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bisa berpadu dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan politik, monoter.

g. Teori Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja, harus diawasi dan salah satu evaluasi tersebut adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya. Sejauh mana tujuan tercapai. Evaluasi digunakan untuk melihat antara harapan dan kenyataan.¹⁹

Menurut Bingham dan Felbinger dalam Lester and Steward, membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Evaluasi proses, yang berfokus pada proses implementasi kebijakan
- 2) Evaluasi implak, yang berfokus pada hasil akhir implementasi
- 3) Evaluasi kebijakan, menilai hasil kebijakan dengan hasil tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
- 4) Mata evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 226.

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakan sebagai evaluasi implementasi kebijakan atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan.²⁰

2. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, supaya dalam masa tumbuhnya dapat berguna untuk diri sendiri dan bagi masyarakat. Maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu sistem sosial yang menjadikan keluarga dan sekolah berperan penting untuk membentuk generasi muda tidak hanya dari aspek jasmani dan rohani saja.²¹

Pendidikan mempunyai arti yang luas, yang mencakup semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta keterampilan kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka, agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula rohani.²²

Adapun pengertian pendidikan menurut para pakar atau ahli pendidikan menurut kajian literature, sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hal. 231.

²¹ Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 89.

²² Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, ed. Rose Kusumaning Ratri (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 121.

- 1) Ki Hajar Dewantara mengatakan, Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
- 2) John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental, emosional kearah alam dan sesama manusia.
- 3) Insan Kamil, pendidikan adalah usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia untuk menjadi manusia seutuhnya.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang dewasa kepada mereka yang belum dewasa. Definisi dari pendidikan ini sendiri adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang

berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasikan kepada generasi berikutnya.²³

b. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan islam adalah segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu, maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar (fitrah), maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai Khilafah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan Ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga terwujudnya insan-insan yang sempurna setelah proses pendidikan berakhir.²⁴

Pendidikan Islam merupakan sebuah kegiatan manusia muslim yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh, terstruktur serta berkesinambungan atas dasar Iman kepada Allah Swt dalam rangka

²³ dkk Sanusi, Uci, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 47.

²⁴ Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.

menghasilkan generasi yang memiliki karakter, mental dan kepribadian yang utuh untuk hidup secara mandiri.²⁵

c. Dasar Pendidikan Islam

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan dasar atau landasan dan tujuan yang berguna untuk memberi arah program dan kebijakan. Untuk mempermudah dalam memahami dasar dan tujuan pendidikan agama Islam maka pembahasan akan diuraikan sebagaimana berikut:

1). Dasar Pendidikan Islam

Dasar-dasar pendidikan Islam merupakan sesuatu yang menjadi pangkal atau landasan dilaksanakannya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam.

Adapun dasar ideal pendidikan identik dengan ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kedua dasar tersebut dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk ijtihad maupun qiyah.²⁶

d. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam mempunyai dua aspek utama yaitu, mencapai tujuan kebahagiaan di

²⁵ Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 3.

²⁶ Ramyulis, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Radar Jawa, Officet Jakarta, 2015)., hal. 166.

dunia dan tujuan kebahagiaan di akhirat. Hal membuktikan bahwa pendidikan Islam bersifat komplit, yaitu merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal.²⁷

Menurut pakar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: yang pertama adalah tujuan umum, yaitu tercapainya tujuan yang dikehendaki, atau tujuan yang diusahakan oleh pendidikan untuk dicapai. Misalnya, menyiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, penguasaan ilmu agama, kemampuan dalam bekerja sama dengan masyarakat dan pembinaan akhlak yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan khusus, yaitu realisasi atau perilaku nyata dari pengetahuan, keterampilan, pola tingkah laku, sikap dan nilai-nilai kebiasaan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah tujuan pendidikan tertinggi, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia paripurna atau *insan kamil*. Seimbang dalam kehidupannya, mampu mengembangkan kehidupannya secara jasmani maupun rohani dan dapat bersosialisasi sebagai warga negara.²⁸

Untuk mencapai kesempurnaan dalam tujuan pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan pendidikan yang baik dari aspek batiniah dan rohaniah. Artinya harus ada keseimbangan dan keserasian dari seluruh aspek kehidupan manusia.

²⁷ Miftahur Rohman), Hairudin), "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Prespektif Nilai-Nilai Sosial Kultural." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 9, No 1 (2018), 25.

²⁸ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 112-114.

e. Fungsi Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam adalah sebagai penyedia fasilitas sehingga pendidikan agama dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut ada beberapa fungsi pendidikan Islam²⁹:

- 1) Mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt serta berakhlak mulia yang sudah lebih dulu ditanamkan di lingkungan keluarga.
- 2) Penanaman nilai pendidikan Islam sebagai pedoman untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- 3) Penyesuaian mental terhadap lingkungan pendidikan Islam.
- 4) Memperbaiki kesalahan siswa dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Pengajaran tentang ilmu agama secara umum dan fungsinya.
- 6) Mencegah hal-hal negatif dari budaya asing sejak dini.
- 7) Menyalurkan siswa untuk belajar pendidikan Islam ke lembaga yang lebih tinggi.

f. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Terdapat dua ruang lingkup pendidikan Islam, yang pertama adalah konsep-konsep yang dibutuhkan untuk perumusan desain pendidikan Islam, yaitu: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar. Teori-teori tersebut didapat dari kajian mendalam terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah

²⁹ Ani Jailani1), Chaerul Rochman2), Nina Nurmila3), "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Jujur Pada Siswa, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 10, No. 2* (2019), hal. 260.

serta berbagai disiplin ilmu lain yang berkaitan seperti: sejarah, psikologi, filsafat, politik, sosial, budaya, hukum, etika dan manajemen.

Yang kedua adalah teori yang diperlukan bagi praktik pendidikan yang memungkinkan untuk memengaruhi peserta didik mengamali peningkatan dan perubahan baik dari segi wawasan, ilmu, pola pikir, sikap, mental maupun kepribadiannya.³⁰

g. Kebijakan Pendidikan Islam

Menurut Muhammad Hamid An-Nashir dan Qullah Qadir Darwis mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah proses perubahan manusia dari sisi jasmaniah, akal, tingkah laku, Bahasa, keagamaan, dan kehidupan sosial yang berubah menuju arah kesempurnaan³¹. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih daya terima atau kemampuan dalam menerima perasaan pada peserta didik, sehingga mereka mempunyai perilaku dalam kehidupan untuk menentukan langkah dan keputusan. Juga semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai Islam yang dapat dirasakan sangat dalam.³²

Menurut Winarno, kebijakan adalah keputusan yang diambil dan dikembangkan oleh lembaga pemerintahan. Namun, kebijakan yang diambil tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan orang banyak dimana faktor yang berpengaruh juga harus dikaji sebelum

³⁰ Mastang Ambo Baba, "Dasar-Dasar Dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Iqra Vol. 6, No. 1* (2018), hal. 127.

³¹ Sigit Priatmoko, "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0.", *Ta'alim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 223.

³² Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 23

kebijakan diterapkan³³. Sedangkan menurut Ahmad Saifudin, kebijakan adalah prosedur menghasilkan keputusan menggunakan data yang digunakan sebagai perumusan masalah dan digunakan sebagai pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah³⁴.

Menurut Fadly Mart Gulton, kebijakan pendidikan Islam adalah keputusan pemerintah dibidang pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan dapat mengamalkan nilai-nilai ajaran islam.³⁵ Kebijakan pendidikan islam dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 meliputi kebijakan mengenai lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non-formal, Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran disetiap jenjang pendidikan, dan materi agama yang sudah termuat dalam kurikulum mata pelajaran di lembaga pendidikan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah rangkaian kegiatan yang dibuat oleh pihak berwenang yang berkaitan langsung dengan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan Islam dan diharapkan dapat membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

³³ Muhammad Munadi and Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang PendidikanI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 17.

³⁴ Ahmad Saifudin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 1* (2015), hal. 216-234.

³⁵ Fadly Mart Gulton, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 10.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hanafi dengan judul *“Rekonstruksi Kepemimpinan Pendidikan Uman bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar Bin Abdul Aziz tidak abai pada pendidikan. Pertama, beliau menanamkan nilai-nilai pendidikan islam pada keluarganya, dimulai dari anak-anaknya, kemudian pada masyarakat dan pada pendidikan formal. Kedua, Umar Bin Abdul Aziz juga mendirikan sekolah-sekolah formal, tidak hanya di kota-kota besar, namun pendirian sekolah formal juga mencapai pelosok negeri. Ketiga, adalah mengirim guru-guru untuk mengajar kesemua sekolah.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh Hasyin Risyidi dengan judul *“Kepemimpinan Profetik Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendidikan pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu pendidikan yang bersifat desentralisasi, dimana pendidikan tidak hanya terpusat pada kota-kota besar namun juga pada daerah yang sudah dikuasai. Disamping itu Umar bin Abdul Aziz juga memberikan kesempatan pada para ulama untuk membuka kelas di masjid dan kelas-kelas yang sudah didirikannya.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dede Rosyadi dengan judul *“Konsep Umar bin Abdul Aziz Dalam Mencapai Tujuan Mendidik Anak”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam mendidik tidak hanya fokus pada transformasi ilmu tapi juga memberikan pengajaran tentang akhlakul karimah. Supaya anak tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas

tetapi juga berkarakter secara mental maupun spiritual. Pengajaran yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah, merangkul dengan ajaran Al-Qur'an, membangun komunikasi yang baik karena pendidik adalah cerminan dari anak didik, menumbuhkembangkan akhlak mulia pada anak, menanamkan sikap adil sejak dini.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurani Puspa Ningrum dengan judul *“Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa memerintah selama dua setengah tahun Umar menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara. Kebijakan alokasi baitul mal dibagi menjadi dua yaitu, pengeluaran untuk masyarakat dan pengeluaran untuk negara. Kebijakan pengeluaran yang diterapkan oleh Umar berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan Umar membuat masyarakat menjadi sejahtera, daya beli meningkat, orang miskin berkurang, keamanan sosial juga terjamin.
5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Teti Nurjanah dengan judul *“Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan (99-110 H/717-720 M).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kesejahteraan berasal dari kebijakan fiskal, yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perpajakan, penerimaan dan pengeluaran keuangan. Pencapaian keadilan ekonomi bagi rakyatnya, Umar menetapkan kebijakan seperti, mengembalikan hak kepada yang berhak, dilarang penjualan tanah kharj, memerhatikan para petani dan meringankan

pajak mereka, menghidupkan tanah-tanah mati dan yang terakhir adalah memberikan mereka sarana penunjang untuk kebutuhan bercocok tanam.

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar dengan judul *“Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.”* Hasil penelitian menunjukkan Umar membuat kebijakan bahwa zakat akan dibagikan langsung untuk para fakir miskin dan orang yang membutuhkan, apabila tidak ditemukan Umar memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan para budak. Umar juga membuat kebijakan untuk para orang kaya berzakat jika harta kekayaannya sudah memenuhi syarat dan mencapai nisab. Kebijakan lainnya adalah pendistribusian zakat fakir miskin kepada golongan, orang yang memintaminta, orang cacat dan orang yang tak punya apa-apa. Rumusan kebijakan Umar bin Abdul Aziz tentang zakat tidaklah hanya menjadi fatwa fikih semata. Rumusan kebijakan tersebut juga menjadi kebijakan negara yang bersifat mengikat dan menjadi payung hukum bagi setiap aktivitas pengelolaan zakat di zaman itu.

Dengan demikian, walaupun sudah ada beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis belum menemukan tulisan, baik berupa skripsi maupun tesis yang secara khusus membahas tentang *“Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Dunia Pendidikan Islam.”*. Oleh karena itu, menurut penulis penelitian ini masih aktual dan perlu dikaji secara mendalam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yakni suatu metode yang menghimpun dan memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas. Informasi tersebut diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, jurnal dan sumber pendukung lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan.

Studi kepustakaan ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus pada saat penulisan, yang bertujuan untuk menemukan informasi-informasi selama masa penulisan.³⁶

B. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu data yang dikumpulkan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena data menjadi sumber atau bahan untuk melakukan penelitian yang dilaksanakan. Pada dasarnya menyusun rencana dari sebuah penelitian adalah hal penting, namun menjadi lebih penting dari itu adalah sumber data dan metode pengumpulannya. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer, sumber data primer adalah sumber data yang bersifat asli dan menjadi dasar dari penelitian dan pengambilannya dilakukan oleh peneliti secara langsung³⁷. Sumber data primer dari penelitian ini adalah

³⁶ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 54.

³⁷ Eko Putro Widyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)., hal. 110.

buku yang berjudul Umar Bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin Yang Adil ditulis oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi yang diterbitkan Oleh Darul HAQ Jakarta pada tahun 2019 dengan tebal 626 halaman.

2. Sumber data sekunder, adalah data yang atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁸ Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data diantaranya: Biografi Umar ibn Abdul Aziz oleh Abdurrahman al-Syarqawi, Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia oleh Herfi Ghulam Faizi, Strategi Dakwah Umar bin Abdul Aziz Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam oleh Zainal Azman, Kepemimpinan Profetik Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz oleh Moh Hasyim Rosyidi, Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadits Dengan Metode Rihlah oleh Atika Febri Christiangsih Tyas dan Ending Bahruddin, Konsep Umar bin Abdul Aziz Dalam Pencapaian Tujuan Mendidik Anak oleh Dede Rohayati, Perkembangan Pendidikan Masa Dinasti Umayyah (41-132 H / 661-750 M) oleh Muchlis, Rekonstruksi Kepemimpinan Pendidikan Umar bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan Oleh Yusuf Hanafiah.

³⁸ Salim dan Haidir, "*Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan Dan Jenis.*" ed. Ihsan Satya Azhar (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 25.

C. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian *library research* antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian.³⁹

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti. Bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah memperbanyak bacaan referensi buku maupun penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, menghimpun, membaca, mencatat semua sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

Kumpulan dari studi kepustakaan yang terdiri dari artikel, jurnal, arsip, majalah dan penelitian-penelitian terkait yang ditelusuri dari sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Mengelompokkan dan menganalisis sesuai dengan tema dan topik penelitian, dapat memperkuat dan mempertajam dalam hasil penelitian. Dan semua data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu metode yang digunakan untuk membahas sebuah informasi secara mendalam untuk membuktikan keaslian dan keautentikan suatu data⁴⁰.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 368.

⁴⁰ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hal. 145.

Analisis data merupakan penguraian atas data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk memahami kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan maka penulis menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Metode ini menitikberatkan pada bagian bagaimana memperoleh keterangan dari sekian banyak sumber. Keterangan-keterangan ini kemudian dianalisis kedalam suatu konstruksi rapi dan teratur.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis semua data yang telah terkumpul, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Memilih data dan mengamati secara cermat terhadap buku, jurnal, artikel dan literature-literatur yang berkaitan dengan Umar Bin Abdul Aziz
2. Mengkategorikan apa saja kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan islam
3. Menganalisis data sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut, yang pertama: mengirim sepuluh ulama untuk mengajar di daerah Afrika, kedua memberikan pengajar gaji yang layak, ketiga melestarikan lembaga-lembaga pendidikan, keempat melakukan pembukuan hadits, dan yang kelima adalah melakukan pengajaran kepada masyarakat dan keluarga yang berfokus pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz sangat berpengaruh pada pendidikan Islam kala itu. Sepuluh pengajar yang dikirim Umar ke Afrika berhasil menghapus buta huruf membuat masyarakat lebih mudah untuk membaca dan memahami Al-Qur'an, menanggung biaya hidup para ulama dan ilmuan membuat mereka dapat dengan fokus menyebarkan ilmu, dakwah yang dilakukan Umar ditengah-tengah masyarakat membuat masyarakat dapat lebih memahami agama dan tidak terjebak dalam aliran sesat, serta keberhasilan pembukuan hadits yang sangat berguna sampai masa sekarang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan Islam, maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Peneliti berharap penelitian ini akan berguna bagi mahasiswa/I yang melakukan penelitian atau mengangkat topik yang sama. Peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian serupa dan topik ini dapat dikaji lebih dalam.
2. Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan berguna bagi para pendidik guna mengajarkan nilai-nilai islami dan menerapkan metode pengajaran yang tidak lepas dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. (2016). *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. (2020). *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa.
- Anggara, Sahaya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Ahmad Masrul. (2015). "Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah." *Jurnal Tarbia* 1.47-76.
- Arwildayanto, Arifin Sulking. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikasinya*. Bandung: Cendekia Press.
- As-Sayuthi, Imam. (2012). *Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam* terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. (2014). *Biografi Umar bin Abdul Aziz* terj. M. Faqih. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. (2019). *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin Yang Adil*. Jakarta: Darul Haq.
- Baba, Mastang Ambo. (2018). "Dasar-dasar dan ruang Lingkup Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Iqra* 6(1). 127.
- Baharun, Hasan. (2018). "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*.35.
- Barnawi, Muhammad Munadi. (2012). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Daud, Safari. (2016). *Histografi Islam Abad Pertengahan (Analisis Materi Sejarah Tarikh Al-Khaufa)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dauly, Haidar Putra. (2016). *Pendidikan Islam Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Prenada Media Grup.
- Faizi, Herfi Ghulam. (2012). *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Dalam Ebook Cahayasairoh.com
- Fikri, Husnul. (2018). "Dialektika Dakwah dan Kebijakan Publik Prespektif Umar bin Abdul Aziz." *Jurnal MD* 2(2). 123-124.

- Gulton, Fadly Mart. (2019). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Haidir, Salim. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Halid, La Adu, dan Zainuddin.(2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanifa , Yusuf. (2021). "Rekonstruksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan." *Al-Fahmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 88.
- Hidayat, Rahmat. (2019). *Konsep Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Irham, Matsuri. (2014). *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Ismail, Faisal. (2017). *Paradigma Pendidikan Islam Analisis Historis, Kebijakan dan Keilmuan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismayani, Ade. (2019). *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Jaelani, Ani, Chaerul Rochman, dan Nina Nurmila. (2019). "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pada Siswa." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 10(2). 260.
- Junaedi, Mahfud. (2017). *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Khulafa dan Imam As-Suyuthi. (2012). *Sejarah Para Penguasa Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Khalid, Muhammad. (2012). "Biografi Khalifah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz." *Ummul Qura*. 60.
- Kurniawan, Moh Haitami, Salim , dan Samsul. (2016). *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Kurniawan, Muh Alif. (2014). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul. (2016). *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Lidwa Pustaka. (2017). *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Online*. Retrieved from Lidwa Pustaka: <http://www.lidwa.com/produklayanan/ensiklopediahadits-kitab-9-imam-versi-online/>
- Mayasari, Duma. (2017). "Membentuk Lingkungan Pendidikan Islami Prespektif Hadits Nabi SAW.", *Jurnal Almufida* 2(2). 47-48.
- Moljum, Muhammad. (2012). *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah* terj. Wiyanto Suud dan Khairul Alam. Jakarta: Noura Books Mizan Publika.
- Mukmin, Tufik. (2017). "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ibadah Puasa (Studi Analisis terhadap Surat AL-Baqarah ayat 183-187)" *Jurnal: el-Ghiroh*, 12(1).
- Mulyani, Tri. (2021). *Kontekstualisasi Hadis Hak Buruh Dalam Prespektif Hemeneutika Hassan Hanafi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Nugroho, Riant. (2015). *Analisis Kebijakan*. Semarang: PT. Elex Media Komplitudo.
- Priatmoko, Sigit. (2018). "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era 4.0." *Ta'alim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2). 223.
- Purwaningsih, Rahma Fitria dan Atika Muiyandari. (2021). "Profesionalisme Guru Dalam Prespektif Islam", *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). 66-69.
- Rahmania, R. (2020). "Model Penggajian Guru Berdasarkan Prespektif Islam Teacher Payroll Models." *Based On Islamic Prespective*, 6(2). 189-196.
- Ramyulis. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Radar Jawa Officet Jakarta.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Salim, Agus. (2019). "Studi Analisis Kodifikasi Hadis", *Jurnal Hikmah*. 16(2). 15.
- Soleh. (2016) "Pendidikan dalam Al-Qur'an: Konsep Ta'alim QS. Al-Mujadalah Ayat 11" *Jurnal: Al-Thariqoh*. 1(2). 124.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabetta.

- Suharto, Toto. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryati, Ai et. al. (2019) "Konsep Ilmu Dalam AL-Qur'an: Studi Tafsir Surat Al-Mujadalah Ayat 11 dan Surat Shaad Ayat 29" *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 217-223.
- Tafsir, Ahmad. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tyas, Atik Febrianing, Ending Baharuddin. (2018). "Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadis Metode Rihlah." *In Annual Conferrnce On Madrasah Studies Bogor: Universitas Ibnu Khaldun*. 109-110.
- Uci, Sanusi et.al. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusanti, Ismail, et.al. (2014). *Menggagas Pendidikan*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Qowin, Agus Nur. (2020). "Metode Pendidikan Islam Prespektif Al-Qur'an" *IQ (Almu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3(1). 49-51.
- Wahid, Abdul. (2013). "Guru Sebagai Figur Sentral Dalam Pendidikan" dalam *Sulesman* 8(1). 6-7.
- Widyoko, Eko Purwo. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zannah, Fathul. (2020). "Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an" *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5(2). 3-4.